

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurahman, 1980, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria*, Seri Hukum Agraria VI, Bandung: Alumni.

Achmad Chomzah, Ali, 2002, *Pedoman Pelaksanaan U. U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah*: Bandung: Alumni.

Ali, Achmad dan Wiwik Haryani, 2013, *Asas-Asas Hukum pembuktian perdata*, Jakarta: Kencana.

Effendi, Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Guntur, I Gusti Nyoman, 2014, *Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta. Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2012, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, Boedi, 1997 (I). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Bandung: Djambatan

- Mahmud Marzuki, Peter, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta,
- Lubis, M. Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*,
Bandung: Mandar Madju
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6,
Yogyakarta: Liberty.
- , 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:
Liberty.
- Parlindungan, A.P., 1998, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT*,
Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyono, Wirahadi, 2013, *Cara Mudah Mengurus Surat Tanah dan Rumah*
(*Buku Terlengkap*), Jogjakarta: FlashBooks.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang*
Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka
Cipta
- Saban.R, *Pajak Bumi di Indonesia dari Masa ke Masa Sejarah Lahir dan*
Perkembangannya), Jakarta: Yayasan Bina Artha.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, 2000, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode*
Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, t.p,t.k,th, Genta Publishing,
Jakarta.
- Rasjidi, Lily, 2007, *Menggunakan Teori/Konsep dalam analisis di Bidang Ilmu*
Hukum, t.p., t.k, Genta Publishing, Jakarta.

Santoso, Urip, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah: Jakarta: Prenada Media.*

-----, 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta

Soepomo, 2010, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.

-----1991, *Hukum Pembuktian*, Bandung: Pradnya Paramita.

-----, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

-----, 2003, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sutedi, Adrian, 2013, *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, Riduan, 1988, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Van Der, Pierre. Australian National University, *After 200 Years, Why Is Indonesia's Cadastral System Still Incomplete?*, Centre For Economic History The Australian National University Discussion Paper Series, Discussion Paper No. 2016-03 February 2016.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Karya Tulis Ilmiah (skripsi/tesis)

Aribisono, Didik Yudha, 2016, *Kedudukan Hukum Bukti Tertulis Selain Sertifikat Terhadap Hak Kepemilikan Atas Obyek Tanah*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Wanseri, 2019, “Kajian Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Milik Perorangan yang Berasal dari Tanah Negara” *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Medan, Area Medan.

Suparyono, Edy, 2008, *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Jurnal

Hasanah, Ulfa, Juni 2005, *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960, tentang Preraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dihubungkan dengan PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 3.

Jabar, Abdul, Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember, *Kekuatan Hukum Surat Girik terhadap Penguasaan Hak atas Tanah dalam Hukum Agraria Nasional*, Jember: Al-Ahwal, Vol.10, 1 April 2018.

Nurkristia, Desy, 2021, *Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No.2.

Oktaviani P, Annisa dan Harjono, Kekuatan Pembuktian Surat Letter C dalam
Pemeriksaan sengketa Tanah di Persidangan (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Perkara Nomor 816 k/Pdt/2016), Verstek: Jurnal
Hukum Acara, Vol. 1, no. 3 (1 Januari-April 2019).

Soekanto, Soerjono, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : UI Press

Stella dan Hasni, 2014, *Analisis terhadap Tanda Bukti Hak atas Tanah berdasarkan
UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait
Penggunaan Girik Nomor 87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 1997 terkait
Penggunaan Girik Nomor 87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat
(Studi Kasus; Putusan Mahkamah Agung Nomor 2459K/PDT/2014),
Jakarta: Jurnal Hukum Adigama.*

Sujadi, Suparjo, 2008, “Status Tanda Pembayaran Pajak Hasil Bumi (Refleksi
Ketidakharmonisan Sistem *Recht Kadaster* dan *Fiscaal Kadaster*
Memberikan Keadilan)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 28, issue. 2.

D. Paparan/ Pendapat Hukum

Arifin, Ing R Sodikin, 2020, *Aspek Yuridis Alas Dasar (Grondrechten) Penguasaan
Hak atas Tanah di seluruh Indonesia*, Jakarta: Hantaru.

Atmawidjaja, TB Djodi, 2017, *Pendapat Hukum tentang Daftar Keterangan Obyek
untuk Ketetapan IPEDA sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta, Daftar
Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Surat Keterangan Ketetapan IPEDA C yang dikeluarkan oleh Kepala
Inspeksi IPEDA Jakarta*, Jakarta.

Sarjita, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah, Makalah*

disampaikan pada Workshop Penguatan SDM Pemerintahan Daerah Kab.

Sleman di Kantor BAPPEDA Kab. Sleman, 11 November 2008.

Sumardjono, Maria S.W., *Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Secara Hukum,*

Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan,

diselenggarakan oleh Sigma Conference, 26 Maret 1996 di Jakarta.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UUPA).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2001, terjemahan

Subekti R dan Tjitrosudibjo R. Cetakan Ke-3, Paramita, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan

Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan

Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 26/DDA/1970 tentang Penegasan

Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-

Ketentuan Umum Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953).

F. Website

Ridho Afrianed, “Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

Sumarno, “Konsultasi Hukum perihal SPPT PBB tidak ada di letter C”, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1362>, diakses tanggal 20 Oktober 2021.

<http://notarismichael.com/ppat/peran-ppt-terhadap-tanah-girik-petok-kikitor-dan-letter-c/>, diakses tanggal 16 Oktober 2021.